

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keputusan pemerintah Indonesia untuk kembali menjalin kerjasama pertahanan dan keamanan dengan AS pasca embargo militer tahun 2005 merupakan langkah strategis, serta merupakan keputusan yang berdasar pada analisis rasional untuk mencapai kepentingan nasional. Kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-AS yang dipulihkan pada masa pemerintahan SBY tahun 2005, membawa dampak signifikan terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam paradigma neoliberalisme, Indonesia menyadari bahwa kerjasama internasional diperlukan untuk mencapai kepentingan nasional dan dapat digunakan dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan ancaman siber, yang tidak dapat diatasi secara unilateral.

Pemerintah Indonesia berfokus pada modernisasi alutsista dan pelatihan militer sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kapabilitas pertahanan nasional, serta berusaha memastikan stabilitas regional dan internasional melalui hubungan bilateral yang kuat dengan AS dan negara-negara lainnya. Indonesia juga mengambil langkah-langkah alternatif dalam pemenuhan kebutuhan militer dengan menjalin kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, memperkuat industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber, dan upaya diplomasi yang intensif untuk melobi pencabutan embargo. Pasca embargo militer tahun 2005 dan kembalinya kerjasama pertahanan dan keamanan dengan

AS, Indonesia tetap menjalin kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara lainnya, bahkan menjalin kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Rusia dan China yang merupakan rival dari AS.

Keputusan Indonesia untuk kembali menjalin kerjasama dengan AS pasca embargo militer 2005 sejalan dengan *rational choice theory* yaitu didasarkan pada berbagai konsekuensi yang menguntungkan dari adanya beberapa kebijakan oleh pemerintah AS. Selain itu, kerjasama ini juga berdampak pada akses ke teknologi militer canggih, pelatihan militer, dan dukungan logistik, yang secara signifikan meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia. Kerjasama ini juga dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional dan memungkinkan peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas regional, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Dengan mempertimbangkan manfaat strategis yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil dari realisasi kerjasama tersebut, keputusan ini mencerminkan strategi rasional untuk memaksimalkan keuntungan nasional.

Kerjasama pertahanan dan keamanan dengan AS, Indonesia tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga stabilitas regional, tetapi juga meningkatkan pengaruhnya dalam berbagai forum internasional. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip neoliberalisme yang mengedepankan kerjasama internasional untuk mencapai kepentingan nasional dan kesejahteraan negara. Secara keseluruhan, keputusan pemerintah Indonesia untuk kembali menjalin kerjasama dengan AS pasca embargo militer 2005 adalah langkah strategis dan rasional yang dirancang untuk mengoptimalkan kepentingan nasional dan mencapai tujuan dalam keamanan global dan stabilitas internasional.

4.2 Saran

Penelitian ini menjelaskan alasan di balik keputusan Indonesia untuk kembali menjalin kerja sama pertahanan dan keamanan dengan AS pasca embargo militer 2005. Peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada pemangku kebijakan dan penelitian selanjutnya yang berorientasi kepada kerjasama pertahanan dan keamanan. Pertama, untuk pemangku kebijakan adalah terus menyesuaikan kebijakan pertahanan nasional dengan dinamika global, mengurangi ketergantungan pada satu sumber alutsista, serta fokus pada transfer teknologi dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian pertahanan nasional dan meningkatkan daya saing industri lokal. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pandangan meskipun suatu negara pernah mengalami hubungan yang buruk dengan negara lain, tidak menutup kemungkinan hubungan tersebut dalam pulih dan lebih erat kembali

Kedua, untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis kasus serupa di negara lain, sehingga dapat memperkaya literatur mengenai hubungan internasional.